

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judul skripsi “Intervensi Rusia di Ukraina Selama Revolusi Euromaidan Pada Tahun 2013-2017” dipilih karena isu intervensi dan revolusi merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas dan dikaji. Rusia merupakan salah satu negara yang dominan di kawasannya. Dominasi Rusia dimulai sejak pecahnya Uni Soviet, yang dimana setelah itu Rusia mengklaim sebagai suksesor dari negara tersebut. Dikarenakan oleh hal ini, Rusia merasa bahwa negaranya masih memiliki dan berhak mengintervensi negara-negara pecahannya. Intervensi Rusia pada Euromaidan menarik untuk dikaji karena hal ini melibatkan gagalnya Ukraina bergabung dengan Uni Eropa pada saat itu.

Kedua negara tetangga ini telah terbelit satu sama lain selama lebih dari 1.000 tahun dengan sejarah yang penuh gejolak. Hari ini, Ukraina adalah salah satu pasar terbesar Rusia untuk ekspor gas alam, rute transit penting ke seluruh Eropa, dan rumah bagi sekitar 7,5 juta etnis Rusia - yang kebanyakan tinggal di timur Ukraina dan wilayah selatan Crimea. Rusia tidak memiliki perbatasan alam seperti sungai dan gunung di sepanjang perbatasan baratnya, sehingga "para pemimpinnya secara tradisional melihat penegasan sphere of influence atas negara-negara yang mengitarinya sebagai sumber keamanan, " kata David Clark, ketua dari Russia Foundation, sebuah think tank. Hal ini berlaku untuk Ukraina, yang dianggap Rusia sebagai “adik” nya. "Semua orang tahu bahwa Ukraina adalah orang Rusia," kata penasihat Kremlin, Sergei Markov. "Kecuali untuk Galicians" - referensi untuk penduduk Ukraina berbahasa Ukraina barat. (Bates, 2014)

Presiden Rusia Vladimir Putin berkata kepada George W. Bush pada pertemuan NATO di Bucharest pada bulan April 2008: "Ukraina bukan negara yang nyata." (Baer, 2018). Dengan ini, ia berarti mengklaim bahwa Ukraina telah menjadi bagian integral dari Rusia selama seribu tahun. Dia secara terbuka mengacu ke Ukraina sebagai "Rusia Kecil".

Hal ini terjadi karena hubungan kedua negara dapat dilacak kembali ke negara Slavia Timur pertama, Kievan Rus, yang membentang dari Baltik ke Laut Hitam dari abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-13 yang awalnya berpusat di Kiev kemudian pindah ke Moskow karena serangan dari Mongol. Setelah keruntuhannya, wilayahnya dipecah oleh kekuatan yang bersaing, yang menginginkan dataran subur yang kemudian membuat Ukraina mendapatkan julukan sebagai "keranjang roti Eropa". (The Editors of Encyclopaedia Britannica)

Negara Ukraina independen pertama dideklarasikan di Kiev pada tahun 1917, setelah runtuhnya kerajaan Rusia dan Austro-Hungaria pada akhir Perang Dunia I. Kemerdekaan itu berumur pendek. Negara baru itu diserang oleh Polandia, dan diperebutkan oleh pasukan yang setia pada tsar dan pemerintah Bolshevik Moskow, yang mengambil alih kekuasaan dalam revolusi Rusia 1918. Pada saat Ukraina dimasukkan ke dalam Uni Soviet pada tahun 1922, ekonominya menjadi hancur dan penduduk Ukraina mengalami kelaparan. Hal yang lebih buruk akan datang, Ketika petani Ukraina menolak bergabung dengan pertanian kolektif pada 1930-an, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengatur eksekusi massal yang menyebabkan kelaparan yang menewaskan hingga 10 juta orang. Setelah itu, Stalin mengimpor jutaan warga Rusia dan warga Soviet lainnya untuk membantu mengisi kembali kawasan timur yang kaya akan batubara dan bijih besi. Migrasi massal ini, kata mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Steven Pifer, membantu menjelaskan mengapa "rasa nasionalisme di Ukraina timur tidak sebesar di barat". Perang Dunia II memperburuk

perpecahan ini. (Zasenko, Hajda, Stebelsky, Makuch, Yerofeyev, & Kryzhanivsky, 2018)

Bahkan ketika Nazi menginvasi Ukraina pada tahun 1941, banyak penduduk setempat yang menyambut Jerman sebagai pembebas dari Soviet, dan puluhan ribu bahkan berjuang bersama mereka, berharap Adolf Hitler akan menghadiahi mereka dengan negara merdeka. Namun, ketika Nazi mulai menggunakan Ukraina sebagai budak, sekitar 2,5 juta orang beralih berjuang untuk Tentara Merah Stalin. Pada akhir perang, Stalin mendeportasi puluhan ribu warga Ukraina yang dituduh bekerja sama dengan Nazi ke kamp-kamp penjara Siberia, dan mengeksekusi ribuan lainnya. (Zasenko, Hajda, Stebelsky, Makuch, Yerofeyev, & Kryzhanivsky, 2018)

Pada tahun 1991, lebih dari 90 persen warga Ukraina memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet yang runtuh. Tetapi Rusia terus mencampuri urusan domestik Ukraina. Dalam pemilihan presiden 2004 di Ukraina, Kremlin mendukung kandidat pro-Rusia Viktor Yanukovych. Kecurangan besar-besaran dalam pemilihan itu memicu Revolusi Oranye, yang membuat Yanukovych lengser dari kekuasaan (Karatnycky, 2005). Kegagalan pemimpin berikutnya menyebabkan Yanukovych muncul kembali pada tahun 2010. Namun setelah ia membatalkan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, ia diusir dari kantor lagi bulan lalu oleh demonstran pro-Barat yang mengatasnamakan "Euromaidan" (Bilash, 2016). Meskipun memicu kemarahan dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mungkin membiarkan Ukraina meninggalkan orbit negaranya. "Rusia tanpa Ukraina adalah sebuah negara," jelas Daniel Drezner, seorang profesor politik internasional di Tufts University. "Namun Rusia dengan Ukraina adalah sebuah kekaisaran."

Sebagai presiden, Yanukovych segera menunjukkan kecenderungan pro-Rusia-nya. Pada April 2010 dia membuat kesepakatan dengan Presiden Rusia Dmitry Medvedev untuk memperpanjang sewa pelabuhan Rusia di Sevastopol,

pangkalan Armada Laut Hitam Rusia, hingga 2042. Sebagai gantinya, Ukraina akan menerima pengurangan harga gas alam Rusia (Harding, 2010). Perdebatan parlementer tentang kesepakatan itu berubah menjadi huru-hara, dengan beberapa anggota oposisi melemparkan telur dan menyalakan bom asap. Yanukovych memancing amarah dari lawan-lawan politiknya ketika ia menyatakan bahwa Kelaparan Besar 1932-33 (kelaparan era Soviet di mana empat hingga lima juta orang Ukraina meninggal) seharusnya tidak dianggap sebagai tindakan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Soviet terhadap rakyat Ukraina, seperti yang dikatakan mantan presiden Yushchenko. (Ray, 2018)

Keputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Oktober 2010 sangat memperluas kekuasaan presiden. Pada tahun 2011 Tymoshenko didakwa dengan penyalahgunaan kekuasaan dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Tahun berikutnya menteri dalam negeri Tymoshenko, Yuri Lutsenko, menerima hukuman empat tahun atas dakwaan serupa; banyak pengamat mencirikan kedua penuntutan sebagai bermotif politik. Pada bulan Oktober 2012, Party of Regions memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilihan parlemen, dan sebagian besar pengamat menganggap pemungutan suara itu relatif bebas dan adil. Tampaknya Yanukovych sedang berusaha untuk beralih ke Barat pada April 2013, ketika ia memerintahkan pembebasan Lutsenko sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa.

Hanya beberapa hari sebelum perjanjian itu akan ditandatangani pada November 2013, Yanukovych menarik diri dari kesepakatan, memicu keributan di antara para pemimpin Uni Eropa dan memicu gelombang protes di Kiev. Putin menjanjikan miliaran bantuan keuangan karena demonstrasi di Maidan (Alun-alun Kemerdekaan) Kiev berlanjut hingga 2014. Yanukovych menanggapi dengan memberlakukan serangkaian tindakan anti-protes (BBC Europe, 2014) yang dengan cepat dicabut oleh parlemen

setelah dua demonstran tewas dalam bentrokan dengan polisi pada Januari 2014 (Ratsybarska, Sindelar, & Viachorka, 2014). Protes menyebar ke timur Ukraina, yang secara tradisional merupakan kubu Yanukovych, dan kekerasan di Maidan meningkat secara dramatis. Lebih dari 70 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi dan pasukan keamanan pada Februari 2014, yang menjatuhkan dukungan terhadap Yanukovych dan administrasinya (Traynor, Ukraine's bloodiest day: dozens dead as Kiev protesters regain territory from police, 2014). Parlemen memilih untuk mendakwa Yanukovych pada 22 Februari; dia menjawab dengan mencela tindakan itu sebagai kudeta dan melarikan diri dari Kiev (BBC News, 2014). Keberadaannya tidak diketahui, pengunjuk rasa turun di atas permukiman mewah Yanukovych di luar Kiev, dan pemerintah sementara Ukraina mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan pembunuhan massal.

Hubungan dan basis dukungan Viktor Yanukovych yang paling dekat selalu dengan Ukraina bagian timur dan selatan yang terutama berbahasa Rusia. Pada tahun 2004, Yanukovych secara terbuka didukung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi hubungan menjadi tegang, paling karena perselisihan tentang biaya gas Rusia. Yanukovych berusaha keras untuk melepaskan citra sebagai "pria Moskow" dan ketika dia menjadi presiden, dia dengan melakukan perjalanan asing pertamanya sebagai presiden ke Brussels, daripada Moskow. Tapi, dengan keadaan finansial Ukraina yang sedang dalam ambang bahaya, ia berpendapat bahwa hubungan perdagangan bebas dengan Uni Eropa akan membahayakan perdagangan Ukraina yang ada dengan Rusia. Uni Eropa menolak permintaannya untuk kompensasi substansial.

Rusia sudah mulai mengencangkan sekrup ekonomi dengan berbagai langkah, termasuk larangan impor permen Ukraina. Miliarder oligarki Rinat Akhmetov, seorang industrialis kuat dan pemilik klub sepakbola Shakhtar Donetsk, adalah sekutu politik Yanukovych sampai ledakan kekerasan di Kiev. Raja energi Dmytro Firtash juga menjadi

suara yang kuat di lingkaran kebijakan ekonomi Ukraina. Dan selama masa jabatannya, dua putra Yanukovych berpengaruh - pengusaha Olexander dan Viktor Yanukovych Junior, seorang anggota parlemen.

Konklusi dari berbagai media menyatakan bahwa motif dibalik intervensi Rusia di Ukraina melalui Yanukovych adalah agar Ukraina selalu dibawah sphere of influence Rusia, dimana ini dapat ditarik dari era Kekaisaran Rusia dan selanjutnya Uni Soviet. Selain itu, ada motif ekonomi dari Rusia yaitu gagalnya action plan tentang kerjasama gas alam antara Rusia dan Ukraina dimana Rusia memotong harga gas alam nya kepada Ukraina dengan tujuan untuk menjauhkan Ukraina dari Uni Eropa.

Pasca Euromaidan, Rusia masih mengintervensi Ukraina dengan militernya. Bukti nyata dari intervensi Rusia di Ukraina adalah aneksasi Crimea yang dilakukan oleh Rusia dengan alasan bahwa Crimea merupakan wilayah daripada Rusia. Selain itu, Rusia juga menduduki sejumlah wilayah di timur Ukraina.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- Mengapa Rusia melakukan intervensi di Ukraina dengan mendukung rezim Yanukovych?

C. Kerangka Teori

Perang di timur Ukraina telah berjalan selama lebih dari tiga tahun. Perang ini sempat mereda, tapi kemudian kembali memanas. Meskipun negara-negara mediator — termasuk Rusia — berupaya mendinginkan suasana, penyelesaian konflik Ukraina secara diplomatis terbilang hal yang mustahil. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis

mengambil konsep intervensionisme dan teori politik luar negeri.

1. Teori Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah salah satu roda yang menggerakkan proses politik internasional. Kebijakan luar negeri tidak terpisah dari kebijakan nasional, melainkan merupakan bagian dari itu. Ini terdiri dari kepentingan nasional yang akan dilanjutkan dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Hampir semua negara menentukan jalannya kebijakan luar negeri mereka dalam batas kekuatan mereka dan realita lingkungan eksternal. Hubungan nonpolitis juga termasuk dalam lingkup kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri dapat di interpretasikan dalam berbagai cara. George Modelski mendefinisikan foreign policy sebagai:

“Serangkaian aktivitas yang dikembangkan oleh komunitas untuk merubah sikap negara lain dan untuk mengatur aktivitas mereka sendiri di lingkungan internasional”
(Modelski, 1962)

Selain itu, definisi kebijakan luar negeri sebagai pengambilan keputusan oleh Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse adalah sebagai berikut:

“Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai tindakan dari pejabat negara yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya di luar batasan negaranya. Proses dari kebijakan luar negeri adalah proses pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan adalah proses *steering* di mana penyesuaian dibuat sebagai hasil *feedback* dari dunia internasional” (Goldstein & Pevehouse, 2014)

Konsep kebijakan luar negeri menjelaskan bagaimana tindakan negara demi mencapai kepentingan nasional dan memberi manfaat bagi negara di ruang lingkup internasional. Adanya pergerakan pro Uni Eropa di Ukraina menjadi pemicu Rusia melakukan intervensi di Ukraina.

Konsep ini akan menjelaskan kebijakan yang dapat mewakili kepentingan nasional Rusia. Dalam kebijakan intervensi terhadap Ukraina, apa yang harus dilakukan Ukraina untuk melakukan itu dan apa dampaknya bagi Rusia. Bagaimanapun, dalam intervensi ini Rusia juga harus mempertahankan citra nya di dunia internasional.

2. Determinan Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah bagian dari kebijakan nasional yang diadopsi negara-negara dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. Semua negara adalah bagian dari sistem internasional. Mereka berdaulat, independen dan untuk sebagian besar berpegang pada gagasan nasionalisme. Maka,

- Kondisi politik domestik,
- Kondisi ekonomi dan militer, dan
- Konteks internasional

Adalah tiga elemen yang menghasilkan dan menentukan kebijakan luar negeri dan arahnya.

Menurut William D. Coplin, ada tiga faktor pertimbangan yang mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Aspek-aspek tersebut adalah politik domestik, kondisi ekonomi dan militer (kedaulatan negara),

dan konteks internasional. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain yang menjadi pertimbangan yang menghasilkan kebijakan suatu negara. (Coplin, 1971)

Unsur pertama adalah politik domestik yang mempengaruhi pengambilan keputusan internasional. Unsur kedua adalah kondisi ekonomi dan militer yang menentukan prinsip menjaga integritas teritorial negara tersebut dan juga untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya. Unsur ketiga, konteks internasional menambah faktor realisme. Tiga poin utama dari konteks internasional ialah unsur geografis, politik, dan ekonomi. Kebijakan luar negeri semua negara didasarkan pada ketiga prinsip ini.

Politik domestik

Kondisi politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internasionalnya baik dikarenakan oleh faktor kultur maupun politik di negara yang bersangkutan. Dalam politik internasional, masyarakat berperan penting dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dapat mengatur strategi, membuat keputusan, bahkan mengevaluasi keputusan yang sudah dibuat. Bahkan di beberapa negara, kepala negara merupakan peran paling penting dalam pengambilan keputusan.

Pembuatan kebijakan luar negeri pada dasarnya adalah proses yang dibentuk oleh eksekutif dan dikendalikan oleh elit. Dalam proses itu, para pengambil keputusan mengembangkan hubungan timbal-balik dengan banyak aktor domestik yang berupaya mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah. (Coplin, 1971) Di satu sisi, para pengambil keputusan membutuhkan dukungan politik dari para aktor politik domestik untuk menerapkan kebijakan pemerintah di seluruh negeri. Sebagai imbalan atas dukungan mereka, yang terakhir membuat tuntutan tertentu pada pengambil keputusan. (Coplin, 1971) Ada banyak cara bagi pengambil keputusan untuk membangun konsensus politik mengenai isu kebijakan

tertentu, seperti aktor domestik yang memiliki “panggung” untuk menyampaikan kepentingan mereka. (Coplin, 1971) Meskipun kebijakan pemerintah terkadang tidak memuaskan tuntutan politik, setidaknya harus memenuhi harapan minimum dari konstituenya.

Menurut Coplin, terdapat empat kategori influencer dalam politik domestik, yaitu influencer birokrat, influencer partisan, influencer kepentingan, dan influencer massa. (Coplin, 1971)

1. *Bureaucratic influencer*, yang mempengaruhi decision maker dengan memberikan masukan pada tahap perumusan kebijakan dan bantuan administratif pada tahap pelaksanaan kebijakan. *Bureaucratic influencer* sangat jarang menentang sebuah kebijakan secara terbuka dan mereka cenderung mencoba merubah kebijakan tersebut melalui keputusan-keputusan tingkat rendah.
2. *Partisan influencer*, ada atau tidaknya mereka, terkadang memiliki andil untuk menentukan kesinambungan jabatan para decision maker apabila disetujui oleh *Bureaucratic influencer*, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak disetujui oleh *bureaucratic influencer*. *Partisan influencer* menganut sistem politik yang tertutup yang tidak memiliki andil banyak dalam pengambilan keputusan. Namun dalam sistem terbuka *partisan influencer* memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah dikarenakan pemilihan umum sangat penting bagi *partisan influencer*.
3. *Interest influencer* dalam sistem tertutup beroperasi melalui *partisan* dan *bureaucratic influencer* secara tertutup dan membuat peran mereka sebagai decision maker bersifat sekunder. Dalam sistem pemerintahan terbuka, mereka memiliki peran yang cukup besar karena mereka memiliki kemampuan finansial dan

dukungan publik untuk mempengaruhi para pengambil keputusan.

4. *Mass influencer* memiliki dampak meskipun dibentuk oleh *decision maker* dan *partisan influencers* dalam sistem tertutup. Dalam sistem terbuka mereka dapat mendapatkan informasi yang menjadi dasar ketidaksepakatan kepada para pengambil kebijakan dan menimbulkan opini publik.

Melihat dari sudut politik domestik Rusia, dapat disimpulkan bahwa Rusia menggunakan influencer birokrat dan kepentingan dalam pengambilan keputusannya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan luar negerinya yang terus mengintervensi wilayah pecahan Uni Soviet dan juga dalam kebijakannya seringkali terdapat kepentingan individu, seperti larangan impor permen Ukraina dan suara Dmytro Firtash, seorang raja minyak di Ukraina, merupakan salah satu suara yang paling didengar oleh pemerintah Rusia dalam pembuatan kebijakannya.

Konteks Internasional

Menurut Coplin, ada tiga elemen dalam konteks internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor geografis, politik, dan ekonomi.

Menilai dari ketiga faktor tersebut, Rusia yang secara geografis berbatasan dengan Ukraina, secara politik Ukraina dikendalikan oleh Rusia, dan secara ekonomi Ukraina bergantung pada Rusia dalam sektor gas alam, maka Rusia dapat bertindak agresif kepada Ukraina dalam pengambilan keputusannya. Hal ini dapat dilihat dari intervensi-intervensi Rusia terhadap Ukraina pasca runtuhnya Uni Soviet.

Kondisi Ekonomi dan Militer

Kondisi dari ekonomi dan militer sebuah negara dapat menjaga integritas teritorial sebuah negara dan juga sebagai alat bargaining dalam pembuatan keputusan. Contoh dari hal ini adalah dari kapasitas militer Rusia yang mampu memberikan ancaman kepada negara seperti Ukraina untuk melancarkan kebijakan luar negerinya. Selain itu kapasitas ekonomi Rusia juga menjadi sorotan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan oleh Ukraina yang mengimpor barang-barang pokok dari Rusia dan hal ini membuat Ukraina harus berhati-hati dalam mengambil sikap.

Kebijakan Luar Negeri Rusia

Kebijakan luar negeri Rusia dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih tegas daripada dalam dua dekade pertama sejak pecahnya Uni Soviet. Kremlin mengejutkan internasional dengan perang di Georgia pada tahun 2008, Intervensi Ukraina dan aneksasi Krimea tahun 2013 hingga sekarang, dan pengerahan pasukannya di tahun 2015 dalam perang Suriah. Didasari oleh agresifnya pemerintah Rusia dalam kebijakan luar negerinya, kalangan para analis, cendekiawan, dan pejabat bahwa Rusia harus memainkan peran yang lebih besar di kancah internasional, di mana Moskow bebas bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri tanpa terikat pada negara lain dan di mana tidak ada masalah global yang dapat diselesaikan tanpa partisipasi Rusia. Sementara wilayah pecahan Soviet terus menjadi titik fokus bagi kebijakan luar negeri Rusia, Moskow juga memulai ulang pendekatannya dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, untuk mencapai kepentingan globalnya. Keberlangsungan pendekatan tegas Rusia dengan kebijakan luar negerinya tergantung pada banyak faktor, diantaranya adalah kondisi ekonomi Rusia.

3. Pendekatan Politik Birokratis

Pendekatan politik birokrasi adalah pendekatan teoritis untuk kebijakan publik yang menekankan perundingan internal di dalam negara.

Pendekatan politik birokrasi berpendapat bahwa kebijakan dihasilkan dari permainan tawar-menawar di antara sekelompok kecil aktor pemerintah yang berposisi tinggi. Para aktor ini masuk kedalam permainan dengan berbagai preferensi, kemampuan, dan posisi kekuasaan. Peserta memilih strategi dan tujuan kebijakan berdasarkan ide-ide berbeda tergantung dari hasil apa yang terbaik untuk melayani kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Tawar-menawar kemudian berlanjut melalui proses pluralis *give and take* yang mencerminkan aturan main yang berlaku serta hubungan kekuasaan di antara para peserta. Karena proses ini tidak didominasi oleh satu individu atau kemungkinan untuk hak istimewa keputusan ahli atau rasional, hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang optimal yang gagal memenuhi tujuan dari setiap peserta individu.

Sebagian besar diskusi tentang politik birokrasi dimulai dengan artikel Graham T. Allison tahun 1969 di *The American Political Science Review*, "Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis" walaupun karya ini dibangun berdasarkan tulisan-tulisan sebelumnya oleh Charles Lindblom, Richard Neustadt, Samuel Huntington, dan lainnya. Allison memberikan analisis krisis misil Kuba yang kontras dengan tawar-menawar politik birokrasi dengan dua model pembuatan kebijakan lainnya. Yang pertama mengasumsikan bahwa keputusan kebijakan dibuat oleh pembuat keputusan yang rasional dan uniter, diwakili oleh "negara" dalam banyak formulasi. Dengan demikian, politik birokrasi sering ditawarkan sebagai tandingan terhadap konsepsi realis atau rasionalis tentang pengambilan keputusan kebijakan. Pendekatan alternatif kedua menggambarkan kebijakan yang dipandu oleh, bahkan dihasilkan dari, prosedur birokrasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menyisakan sedikit ruang

untuk tindakan otonom oleh pembuat keputusan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan ini dan konsepsi alternatif lain dari pembuatan kebijakan, model politik birokrasi mewakili organisasi dan negara yang signifikan dan khas dan, dalam hubungan internasional, teori organisasi, kebijakan publik, dan politik.

Mungkin konsep yang paling pasti dari model politik birokrasi, adalah bahwa para aktor akan mengejar kebijakan yang menguntungkan organisasi yang mereka wakili daripada kepentingan nasional atau kolektif. Untuk ahli teori ini, tiga pertanyaan kunci memandu pemahaman seseorang tentang permainan pembuatan kebijakan: (1) Siapa aktornya? (2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi posisi masing-masing aktor? dan (3) Bagaimana posisi aktor berkumpul untuk menghasilkan kebijakan pemerintah?

Meskipun model politik birokrasi telah digunakan untuk menggambarkan pengambilan keputusan dalam banyak konteks yang berbeda, model ini paling umum diterapkan pada pembuatan kebijakan nasional di Rusia dan khususnya untuk kebijakan luar negeri Rusia.

4. Konsep intervensionisme

Intervensi adalah konsep yang membahas karakteristik, penyebab, dan tujuan suatu negara yang mencampuri sikap, kebijakan, dan perilaku negara lain. Intrusi politik, kemanusiaan, atau militer dalam urusan negara lain, tanpa menghiraukan motivasi, adalah usaha yang sangat mudah berubah yang dimana hasil dari upaya ini telah lama diperdebatkan oleh para filsuf dan politisi.

Suatu tindakan harus bersifat koersif untuk dipertimbangkan sebagai intervensionisme. Dengan kata lain, intervensi didefinisikan sebagai tindakan yang mengancam yang tidak diinginkan oleh target intervensi. Agresivitas juga penting bagi konsep intervensionisme dalam urusan luar

negeri: tindakan intervensionis selalu beroperasi di bawah ancaman kekerasan. Namun, tidak semua tindakan agresif di pihak pemerintah bersifat intervensionis. Peperangan defensif dalam yurisdiksi hukum negara sendiri tidak bersifat intervensionis, bahkan jika melibatkan penggunaan kekerasan untuk mengubah perilaku negara lain. Suatu negara membutuhkan keduanya untuk bertindak di luar batas-batasnya dan mengancam kekuatan untuk menjadi agen intervensionisme.

Suatu negara dapat terlibat dalam berbagai kegiatan intervensionis, tetapi yang paling penting adalah intervensi militer. Intervensi semacam itu memiliki banyak bentuk tergantung pada tujuannya. Sebagai contoh, suatu negara dapat menyerang atau mengancam untuk menyerang yang lain untuk menggulingkan rezim yang menindas atau memaksa yang lain untuk mengubah kebijakan domestik atau luar negerinya. Kegiatan intervensionis lainnya termasuk blokade, boikot ekonomi, dan pembunuhan pejabat kunci.

Betapapun suramnya legalitas intervensi, moralitasnya bahkan lebih suram. Banyak yang memperdebatkan apakah mencampuri urusan internal negara lain dapat dibenarkan secara moral. Seperti halnya dilema, intervensionisme juga muncul dari perjuangan antara dua prinsip yang saling bersaing. Penentang intervensionisme berpendapat bahwa campur tangan dengan kebijakan dan tindakan negara lain tidak akan pernah benar, terlepas dari motivasi agresor, dan bahwa suatu negara memaksakan kehendaknya pada yang lain adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, orang bisa juga berpendapat bahwa membela yang lemah terhadap penindasan adalah kewajiban moral yang lebih diutamakan daripada hak dibiarkan tanpa gangguan. Terbukti, kedua posisi itu bersandar pada argumen moral yang kuat, yang membuat perdebatan intervensionis secara tradisional mendukung dan kadang-kadang sangat bertentangan. Lebih jauh lagi, mereka yang menyetujui perlunya intervensi mungkin tidak setuju pada rincian seperti asal, besar, tujuan, dan waktu intervensi yang direncanakan. (Sibii, 2017)

Rusia telah menduduki Ukraina selama beberapa ratus tahun. Pada mulanya, itu adalah Kekaisaran Rusia, kemudian adalah Uni Soviet, tetapi bagian tertentu (cukup besar) dari Ukraina telah menjadi bagian dari Rusia selama bertahun-tahun ini (kecuali periode singkat Perang Kemerdekaan Ukraina). Dan mulai dari September 1939 seluruh wilayah Ukraina modern diduduki oleh Uni Soviet. Hanya sekitar 20 tahun sebelum perang ini (dimulai pada tahun 2014 oleh Rusia) Ukraina menjadi independen sampai batas tertentu. Dan empat tahun terakhir kemandirian ini menjadi semakin kuat.

Ratusan tahun pendudukan orang-orang Rusia ini menyita budaya, sejarah, gereja, pendidikan, bakat, hidup masyarakat Ukraina, dan melakukan segala yang mereka bisa untuk melemahkan hak Ukraina untuk menjadi sebuah bangsa. Sebagian besar orang Rusia tidak mengakui Ukraina sebagai bangsa; mereka tidak berpikir kita memiliki hak untuk merdeka dan kenegaraan. Mereka hanya biasa berpikir tentang Ukraina sebagai bagian dari Kekaisaran Rusia, dan propaganda resmi Rusia mempromosikan "pendapat" ini. Bahkan, mereka memperlakukan Ukraina seperti yang dilakukan pemerintahan totaliter.

Masalahnya adalah bahwa Rusia tidak pernah bisa menjadi kekaisaran tanpa Ukraina, tetapi mereka sangat ingin menjadi kekaisaran seperti sebelumnya. Jadi mereka sangat perlu merusak kebebasan dan kenegaraan Ukraina, untuk menekan perjuangan Ukraina untuk kemerdekaan, dan menjadikan Ukraina bagian dari Rusia. Ini adalah satu-satunya cara mereka melihat untuk membuat Rusia hebat (karena mereka memahami kebesaran) lagi. Mimpi buruk Rusia terburuk adalah Ukraina independen yang kuat, yang menjadi bagian dari Uni Eropa dan NATO dan mengungguli Rusia secara ekonomi, teknologi dan militer, menggantikan Rusia sebagai pemimpin regional.

D. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi pada kerangka dasar pemikiran dan rumusan masalah di atas, maka dapat dihasilkan kesimpulan sementara sebagai berikut. Rusia melakukan intervensi di Ukraina karena:

Rusia memiliki *bureaucratic influencer* (h. 13) (segelintir orang maupun sebuah organisasi dalam pemerintahan sebagai *policy influencer*, seperti Putin dan kroni nya) dan *interest influencer* (h.14) (sekelompok individu yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai *policy influencer*, seperti Dmytro Firtash dan Gazprom) terhadap Ukraina.

E. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan batasan pada penyusunan skripsi ini, penulis hanya akan membahas seputar intervensi Rusia terhadap Ukraina yang berlangsung selama Euromaidan, hubungan diplomatik kedua negara, serta alasan mengapa Rusia mengintervensi Ukraina.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian saya bertujuan untuk memaparkan peran-peran kaum birokrat dan interest Rusia di Ukraina selama revolusi Euromaidan, dan juga untuk melengkapi kajian ilmu Hubungan Internasional tentang krisis yang berlangsung di Ukraina.

G. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan referensi dan acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

H. Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan library research. Dengan metode seperti itu penulis menghimpun data kepustakaan yang kemudian di olah sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Data kepustakaan yang diambil merupakan Data Sekunder yang berasal dari berbagai literatur, buku, jurnal, media elektronik serta situs-situs internet yang dapat di jadikan bahan untuk memperjelas penulisan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I

BAB I akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

BAB II akan membahas gambaran umum sejarah hubungan antara Ukraina dengan Rusia dari merdekanya kedua negara tersebut hingga saat ini. Bab ini akan membahas antara lain: Awal mula hubungan Rusia dan Ukraina, Hubungan kedua negara saat era Uni Soviet, dan hubungan kedua negara pasca pecahnya Uni Soviet

BAB III

BAB III akan membahas awal terjadinya konflik dan aktor-aktor pendukungnya. Sistematika bab ini adalah sebagai

berikut: Pemicu konflik di Ukraina, Konflik Euromaidan, Aktor dibalik Konflik Rusia-Ukraina

BAB IV

BAB IV akan membahas tentang sebab-sebab para bureaucratic dan interest influencer Rusia berkecenderungan mengintervensi politik domestik maupun internasional Ukraina, dan juga perluasan dari konflik. Sistematika bab ini adalah sebagai berikut: Alasan para bureaucratic influencer mengintervensi Ukraina dan Alasan para interest influencer mengintervensi Ukraina

BAB V

BAB V akan berisi kesimpulan.